

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**



**KECAMATAN KALIANGKRIK
Jalan Lettu Wakidi No. 2 Kaliangkrik-Magelang 56153**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/185/KEP/24/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022;
3. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2022;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;
6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2022;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022;

19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022;
21. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022;
23. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;
24. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022;
26. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
27. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2022;
28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2022;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2022;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2022;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2022;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2022;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2022;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2022;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2022;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2022;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2022;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2022;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caridimulyo Tahun 2022;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2022;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2022;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2022;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2022;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2022;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2022; dan
48. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd


ZAENAL ARIFIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Kaliangkrik pada Tahun 2022

Maksud dari penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Kaliangkrik. Apabila dalam penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini.

Kami berharap Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, semoga bermanfaat, Aamiin.


SUPARYANTO, SH.
* MAG Pembina
NIP. 19791228 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD	4
BAB III RECANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	7
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah pada pasal 303 menyebutkan bahwa :

1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat daerah kabupaten/Kota.
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati/walikota melalui Bappeda Kab/Kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 ini adalah :

1. Untuk memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Kecamatan Kaliangkrik dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun .
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun ke depan;
3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya .

C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Kaliangkrik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara , Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7) ;
10. Peraturan Bupati Magelang nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 40)
11. Peraturan Bupati Magelang nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35)
12. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/185/KEP/24/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD

Evaluasi Hasil Renja SKPD Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2022 Triwulan II sebagai dokumen evaluasi kegiatan Tahunan, mempunyai sasaran antara lain :

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra (Prioritas kegiatan tahunan dalam kerangka pencapaian Visi dan k selama 5 Tahun)
2. Sebagai media check and balance bagi pelaksanaan kegiatan tahunan SKPD yang akuntabel, sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Terlampir kami laporkan Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD Triwulan II Tahun 2022.

Sebagai gambaran Evaluasi di Kecamatan Kaliangkrik sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran perlu lebih dioptimalkan lagi. Dalam triwulan ini masih terjadi pandemi covid 19 yang kemudian mendorong terjadinya pergeseran/ refocussing pagu anggaran (pengurangan) yang terjadi di beberapa kegiatan dan sub kegiatan, demikian pula dengan beberapa kegiatan yang harus disesuaikan pelaksanaannya akibat kondisi yang ada.

Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II 2022 secara garis besar dapat dilihat dari dari gambaran capaian kinerja program kegiatan di Kecamatan Kaliangkrik sebagai berikut:

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II secara garis besar dapat dilihat dari dari gambaran capaian kinerja program kegiatan di Kecamatan Kaliangkrik sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
telah berjalan dengan realisasi kinerja mencapai 61,63 %
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Telah berjalan dengan realisasi kinerja sebesar 60 %.
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Telah berjalan dengan realisasi kinerja sebesar 80%.

4. **Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Telah berjalan dengan realisasi kinerja sebesar 60%

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** telah

Telah berjalan dengan realisasi kinerja sebesar 60,63 %

Dari Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Kaliangkrik Triwulan II Tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Jumlah anggaran belanja operasi di pagu penetapan pada Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022 sebesar Rp. 1.862.538.400,- sampai dengan triwulan II realisasinya sebesar Rp. 898.385.420,- atau sebesar 48,23 %

Rata-rata capaian kinerja program pada Triwulan II tahun 2022 adalah 64,45 % (rendah) demikian juga untuk capaian kinerja keuangan sebesar 48,23 % (sangat rendah).

Dalam upaya mencapai target kinerja kegiatan dengan program telah diupayakan untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka mengupayakan peningkatan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu –isu yang ada tidak terlepas dari indikator Kinerja Utama yang ada yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Beberapa isu penting terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian dan permasalahan pada sistem aplikasi penatausahaan pada awal tahun yang hingga saat ini masih disempurnakan, disesuaikan dan dilaksanakan perbaikan/maintenance oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Pencatatan capaian kinerja yang didasarkan waktu ditransfernya dana ke rekening Kecamatan (secara pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan administrasi sudah terselesaikan, dan proses pengajuan di akhir bulan, namun pencairan dana terealisasi di awal bulan berikutnya)

3. Adanya kekurangcermatan dalam proses pengadministrasian sehingga sering harus melakukan proses revisi dan pemenuhan ketercukupan syarat administrasi.
4. Adanya rotasi pegawai yang tentunya memerlukan penyesuaian dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan sudah memasuki tahap pertengahan pelaksanaan tahun anggaran yaitu Triwulan II sehingga tentunya masih banyak target rencana kinerja telah ditetapkan yang harus segera dicapai, dan diharapkan dapat terealisasi sesuai pelaksanaan rencana kerja operasional, untuk selanjutnya kegiatan perubahan di Triwulan IV akan tetap diupayakan tercapai secara maksimal.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami kekurangan dan hambatan, namun kaidah-kaidah pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Kaliangkrik dan mengacu pada DPPA, dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu Perubahan APBD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisa Bappeda dan Litbangda serta menimbang penyesuaian kondisi yang ada maka diperlukan perubahan dalam rencana kerja tahun 2022. Dengan adanya beberapa pertimbangan yaitu perubahan kondisi kenaikan Tarif dasar listrik, Kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perawatan dan penggantian suku cadang secara rutin, dan kondisi kebutuhan pengelolaan dan pengamanan fasilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya. Adapun rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 yang dikelola Kecamatan Kaliangkrik di Tahun 2022 juga mengalami perubahan/ penyesuaian di beberapa Program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tertuang dalam Perubahan Renja ini yaitu pada :

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - b. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Secara umum program ataupun kegiatan masih sesuai dengan renja penetapan, namun pagu anggaran kegiatan mengalami penyesuaian. Pagu ditambah dan disesuaikan/ digeser sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan riil di lapangan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan mengalami perubahan pagu anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Perubahan pada sub kegiatan ini terdapat pada kebutuhan gaji ASN beserta tunjangan pendukungnya, penyesuaian berupa penambahan pada beberapa rekening merupakan penyesuaian yang dikarenakan adanya penambahan personil ASN di lingkungan pemerintahan Kecamatan Kaliangkrik, sehingga memerlukan penambahan pagu pada rekening gaji pokok, tunjangan keluarga, dan rekening lainnya yang menyertai.

Kemudian pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD lebih pada pemenuhan honor pengelola pertanggungjawaban keuangan yang baru teranggarkan 7 bulan.

b. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ada penyesuaian pagu kebutuhan belanja listrik dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar listrik.

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kenaikan lebih ditekankan pada kebutuhan rutin perawatan dan suku cadang kendaraan dinas operasional

- Pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya membutuhkan penambahan anggaran dikarenakan ada penyesuaian pagu pada rekening belanja iuran jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan Kesehatan tenaga non ASN. Selain itu 1 (satu) personil petugas keamanan ASN pada kecamatan yang purna tugas. Kondisi lingkungan kecamatan yang cukup luas belum sepenuhnya berpagar, dengan kondisi Gedung kantor yang tidak berpengaman/ berteralis memerlukan pengamanan yang ekstra,

sehingga pada anggaran perubahan ada usulan penambahan personil tenaga harian lepas sebagai tenaga kemanana/ penjaga malam.

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Pada Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah mengalami pergeseran pemanfaatan rekening perjalanan dinas/ transport local ke rekening makan minum rapat.

Secara rinci rencana pendanaan pada kegiatan perubahan 2022 termuat dalam tabel pagu pendanaan program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja SKPD (Renja Perubahan) merupakan dokumen yang berisi rancangan arah dan langkah Kecamatan Kaliangkrik sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi Organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu 2022. Disusunnya Perubahan Renja untuk memberi kerangka acuan penjabaran program dan kegiatan perubahan Kecamatan Kaliangkrik dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan renja Kecamatan Kaliangkrik Tidak lepas dari dukungan semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam melaksanakan Visi, Misi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan rencana, kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Demikian Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022 disusun, diharapkan nantinya dapat terselenggara pembangunan daerah yang selaras dan konsisten sesuai dengan perencanaan dan tujuan, dan bisa mencapai target kinerja yang maksimal baik kinerja fisik maupun keuangan, sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran yang dilaksanakan dapat menunjang tercapainya tujuan, visi-misi Kecamatan Kaliangkrik.

Kaliangkrik, 24 Agustus 2022.


Kaliangkrik
SUPARYANTO, SH
Pembina
NIP 19791228 199803 1 001

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGREK
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0009 KECAMATAN KALANGREK

Kode	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Prakiraan Majo Rencana Tahun 2023		
	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Keterangan Dana/ Page Indikatiff (Rp.)	
					Sebelum	Sesudah			
	Program	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	UNSUJUR KEWILAYAHAN								
7 0	KECAMATAN								
7 0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7 0 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7 0 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penentise ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja operasional yang tersusun Jumlah dokumen RPTK yang tersusun Jumlah rencana kerja perangkat daerah yang tersusun	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalangit, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 80 angka (0-100) 80 angka (0-100)	1,012,500 1,012,500 1,012,500	2,750,000
7 0 0 1 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja (SKP)	Penentise ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalangit, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	80 angka (0-100) 80 angka (0-100) 80 angka (0-100)	600,000 600,000 600,000	600,000
7 0 0 1 1 1 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penentise ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalangit, Semua Kelurahan	100 % 100 %	80 angka (0-100) 80 angka (0-100)	600,000 600,000	2,200,000
7 0 0 1 1 1 1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 0 0 1 1 1 1 1 01									1,999,502,250
7 0 0 1 1 1 1 1 02									1,887,811,750
7 0 0 1 1 1 1 1 01									5,550,000
7 0 0 1 1 1 1 1 02									1,999,502,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.20.0.00.13.0000 KECAMATAN KALANGKRUK
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KALANGKRUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Cada n Perin g	Preleinan Maja Rencana Tahun 2023			
					Program	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Target			Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
																Sebelum	Sesudah	Sebelum
0 0 2 0 1 1 2 1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 bulan	14 bulan	90 angka (0-100)	90 angka (0-100)	1,518,765,400	1,667,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	1,706,000,000
0 0 2 0 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan keuangan SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 laporan	6 laporan	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	15,265,000	21,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	27,508,000
0 0 2 0 1 1 02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	500,000
0 0 2 0 1 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang teridentifikasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 orang	15 orang	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	500,000
0 0 2 0 1 1 06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang teridentifikasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 orang	15 orang	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	500,000
0 0 2 0 1 1 06	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kali	12 kali	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	500,000
0 0 2 0 1 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 buku	1 buku	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	14,313,000	14,313,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	16,050,000
0 0 2 0 1 1 06	Penyediaan Bahan Baruan dan Perawatan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kallangkruk, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 buku	1 buku	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	750,000

Kabupaten Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KALLIANGKRIK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KALLIANGKRIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Praliman Mula Rencana Tahun 2023		Kebijakan Dana/ Pagu Indikator (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7002002001169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	12 layanan 10 kali 60 kali	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	13.313.000	13.313.000	100 %	14.500.000
7002002001160	Penzastuhan Arisp Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	10 arisp	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	500.000	500.000	100 %	800.000
7002002001108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									29.522.000	33.800.000		30.890.000
7002002001181	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1750 surat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	3.200.000	3.200.000	100 %	3.200.000
7002002001182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	48 rekening bulan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	26.328.000	30.600.000	100 %	27.000.000
7002002001109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									112.013.000	121.122.500		98.513.750
7002002001192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1 Unit 8 Unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	55.863.000	57.825.500	100 %	43.013.750
7002002001195	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1 Unit	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Magelang, Kalliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	1.000.000	1.000.000	100 %	1.500.000

Kabupaten Magelang
Tahun 2022

InR Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGORIK
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.13.0000 KECAMATAN KALANGORIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan	Preferensi Mula Rencana Tahun 2023		Kategori Dana/ Pagar Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Terdik Uluh	Tertarget	
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah									
7002001196	Pemeliharaan/Perbaikan/ Pelebaran dan Peningkatan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan tanggapan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	100 %	100 %	1 Unit	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan tanggapan perangkat daerah	12.000.000	
7002001199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan tanggapan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Luas gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	4500 m2	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	45.150.000	52.297.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan tanggapan perangkat daerah	43.000.000	
7002002002	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7002002004	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diampungkan kepada Camat																
700200200412001	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Persentase pelayanan publik sesuai SOP	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	100 %	100 %	1 dokumen	100 %	100 %	750.000	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	1.500.000	
700200200412002	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Persentase pelayanan publik sesuai SOP	Jumlah dokumen layanan perizinan non perizinan	100 %	100 %	20 dokumen	100 %	100 %	27.631.000	27.650.745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	30.000.000	
700200200412003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
70020020041200301	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
7002002004120030113011	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa yang terlibat administrasi	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemertintah kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	84 %	84 %	20 dokumen	94,6 %	94,6 %	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84 %	Persentase desa yang terlibat administrasi	13.200.000	
7002002004120030113011	TOTAL																
					33.500.000	33.500.000	33.500.000	11.500.000	11.500.000	33.500.000	33.500.000					34.200.000	22.200.000

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Misi Kegiatan	Lulus Output Kegiatan	Tercapai Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Catatan	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori		
						Program		Misi Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah
0 0 2 0 1 3 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pmbudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa yang terlibat administrasi	Jumlah desa layak anak jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi pembangunan desa jumlah desa yang terkoordinasi penanganannya jumlah dokumen profil desa yang tersusun jumlah peserta yang dilatih dan ditrimakan dalam kemitraan kebudayaan	Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kalangantrik, Semua Kelurahan	84 %	84 %	20 desa 20 desa 20 desa 20 desa 20 dokumen 2 orang	94,6 %	94,6 %	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang terlibat administrasi	84 %	9.000.000	
7 0 0 2 1 3 0 3	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Karang Taruna yang dibina jumlah LPMK yang dibina jumlah TP PKK desa yang dibina	Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kalangantrik, Semua Kelurahan	84 %	84 %	20 Karang Taruna Desa 20 LPMK 20 TP PKK desa	94,6 %	94,6 %	22.000.000	22.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang terlibat administrasi	84 %	12.000.000	
7 0 0 2 1 3 1 1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang terlibat administrasi															
7 0 0 2 1 4 0 1	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
7 0 0 2 1 4 0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum																
7 0 0 2 0 1 4 1 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lintara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketertiban umum dan ketertibanan	Jumlah anggotanya pas-tiba yang terbiasa jumlah desa yang terfasilitasi penangan-pengendalian bencana jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan jumlah wilayah desa yang dibina	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kab. Magelang, Kalangantrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 orang 20 desa 12 kali 20 orang	94,6 %	94,6 %	24.500.000	24.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi penanganan masalah ketertiban umum dan ketertibanan	100 %	26.500.000	

Kabupaten Magelang Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
					Program	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7116020020010011601001	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																						
7116020020010011601001	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
71160200200100116010011	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah desa yang terbentuk administrasinya	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 desa	20 desa	94,6 %	94,6 %	20 desa	20 desa	2.500.000	2.500.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				3.000.000		
71160200200100116010012	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan Aset Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah desa lulus PBB	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 desa	20 desa	94,6 %	94,6 %	20 desa	20 desa	2.500.000	2.500.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				3.000.000		
71160200200100116010013	Fasilitasi Perencanaan dan Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah peraturan penunjang undang yang disosialisasikan	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 peraturan	2 peraturan	94,6 %	94,6 %	2 peraturan	2 peraturan	1.500.000	1.500.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				1.500.000		
71160200200100116010014	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah perangkat desa yang terpilih	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 orang	20 orang	94,6 %	94,6 %	20 orang	20 orang	2.000.000	2.000.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				2.000.000		
71160200200100116010015	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah kepala desa yang terpilih	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Selomulyo	100 %	100 %	1 orang	1 orang	94,6 %	94,6 %	1 orang	1 orang	39.270.000	39.270.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				0		
71160200200100116010016	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah jumlah anggota DPRD yang terpilih	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 orang	20 orang	94,6 %	94,6 %	20 orang	20 orang	1.500.000	1.500.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				2.000.000		
71160200200100116010017	Rekomendasi Pengawasan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah pemberhentian perangkat desa yang terpilih	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 orang	20 orang	94,6 %	94,6 %	20 orang	20 orang	1.500.000	1.500.000	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				2.000.000		
71160200200100116010018	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kab. Magelang, Kaliangkrik, Semua Kelurahan	100 %	100 %	115 orang	115 orang	94,6 %	94,6 %	115 orang	115 orang	11.785.500	11.785.500	100 %	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				6.790.500		
TOTAL														2.010.144.245	1.862.518.400								1.999.502.296

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALIANGRIK
TRIWULAN II TAHUN 2022

get kinerja PD Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
Jaltes Pelayanan Publik

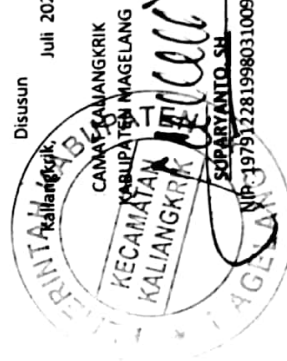
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (silih periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja SKPD tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (%)		Unit PD Pening gung jawa
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5	6	7	9	12=8+9+10+11	13=12/7 x 100%	14=4+12	15=14/5x100%	16	17							
PROGRAM PEMULIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase terlampainya perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan kesugunan perangkat daerah	100%	% NA	100	% 1.583.943.927	100	% 1.713.596.900	61,63%	848.055.968	61,63%	49,49%							
	2.																	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	152	% NA	100	38 dokumen	38	2.212.500	18,00	dokumen	68,33%	45,79%							
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	2	% NA	100	1 dokumen	1	1.012.500	60,00	%	100,00%	100,00%	0,07% ^S						
	Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	8	dokumen NA	2	dokumen	2		1,00	dokumen	50,00%								
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	4	dokumen	1	dokumen	1		1,00	dokumen	100,00%								
	Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	4	dokumen	1	dokumen	1		1,00	dokumen	100,00%								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yang Tersusun	4	% NA	100	4 dokumen	4	600.000	55,00	%	0	0,00%	0,00%						
	Jumlah SOP yang Tersusun	6	dokumen	2	dokumen	2			dokumen	0,00%								
	Jumlah Dokumen Data Perangkat Daerah yang Tersusun	4	dokumen NA	1	dokumen	1			dokumen	0,00%								
	Jumlah Defiar Informasi Publik yang Tersusun	4	dokumen NA	1	dokumen	1			dokumen	0,00%								
	Jumlah dokumen SP yang tersusun	1	dokumen	1	dokumen	1			dokumen	0,00%								
	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang Tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	4	dokumen NA	1	dokumen	1	40.000		dokumen	0,00%								
Evaluasi Kinerja Perangkat			100	100	716.000	100	600.000	20,00	%	0	50,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD L.d. Renja SKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang direvisual (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisual (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Unit PD yang bertanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2				2	dokumen NA	1	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0,00%		15-14/5x100%	16	17	
	Daerah		Jumlah dokumen evaluasi renstra yang tersusun	1	dokumen NA	12	dokumen	3	dokumen	6,00	dokumen	6,00	dokumen	50,00%					
			Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	1	dokumen NA	8	dokumen	2	dokumen	4,00	dokumen	4,00	dokumen	50,00%					
			Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun	32	dokumen NA	8	dokumen	2	dokumen	4,00	dokumen	4,00	dokumen	50,00%					
			Jumlah kegiatan yang dikelola	42	kegiatan NA	9	kegiatan	12	kegiatan	561.870.891	kegiatan	786.271.815	kegiatan	60,00%	50,60%			KEC. KALIAN GOROK	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	44	bulan NA	14	bulan	14	bulan	550.685.331	bulan	775.086.055	bulan	60,00%	50,37%				
			Jumlah laporan keuangan yang tersusun	24	laporan NA	6	laporan	6	laporan	11.185.560	laporan	11.185.560	laporan	60,00%	73,28%				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah aset yang dikelola	256	unit	256	unit	256	unit	0	unit	256,00	unit	0,00%	0,00%			KEC. KALIAN	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	6	dokumen NA	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	1,00	dokumen	50,00%	0,00%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang Terfasilitasi Administratif Kepegawaian	60	orang NA	15	orang	15	orang	292.255	orang	533.205	orang	60,00%	53,32%			KEC. KALIAN GOROK	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah ASN yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya	1	orang NA	-	orang	15	orang	292.255	orang	0	orang	100,00%	58,45%				
			Jumlah JFT yang Terfasilitasi Penilaian Angka Kreditnya	1	orang NA	-	orang	2	orang	0	orang	2,00	orang	100,00%	100,00%				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Frekwensi Pembinaan ASN	48	kali NA	-	kali	12	kali	0	kali	9,00	kali	60,00%	48,15%				
			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	8	Layanan NA	8	Layanan	8	Layanan	6.315.950	Layanan	9.245.700	Layanan	74,33%	64,60%				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bahan pustaka yang dikelola	22	buku NA	1	buku	1	buku	240.950	buku	240.950	buku	78,00%	48,15%				
			Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	230	kali NA	50	kali	60	kali	6.075.000	kali	42,00	kali	70,00%	64,47%			KEC. KALIAN GOROK	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	50	kali NA	-	kali	10	kali	-	kali	10,00	kali	100,00%	0,00%				
			Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	36	layanan NA	1	layanan	12	layanan	-	layanan	-	layanan	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja SKPD tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Minorja dan anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	9	12-8-9-10-11	13-12/7 x 100%	14-6-12	15-24/5x100%	16	17							
			Jumlah arsip yang dilemba	40	800.000	10	arsip	500.000	10	arsip	10,00	421.750	75,00%	84,35%						
			Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	31.891.903	8	Layanan	29.528.000	8	Layanan	10.481.634	14.708.347	60,00%	49,81%						
			Jumlah Surat yang dilemba	7.000	6.890.000	1.750	surat	3.200.000	300	surat	835,00	1.819.910	70,00%	56,87%						
			Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	192	25.001.303	48	rekening bulan	26.328.000	12	rekening bulan	24,00	12.888.437	50,00%	48,95%						
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	95.387.398	1	unit	112.013.000	1	unit	36.284.601	36.284.601	58,75%	32,39%						
			1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	1	41.094.711	100	%	55.863.000	1	unit	14.170.484	14.170.484	50,00%	25,37%						
			2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	8		8	unit		8	unit	8,00		100,00%							
			Jumlah Mebel / Perengkapan yang dipelihara	4	2.173.250	1	unit	1.000.000	1	unit	1.000.000	1.000.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah peralatan yang dipelihara	4	3.060.000	1	unit	10.000.000			338.6640	3.384.640	45,00%	33,85%						
			1. Luas gedung kantor yang dipelihara	4.500	49.059.377	100	%	45.150.000	4500	m2	17.729.477	17.729.477	40,00%	39,27%						
			2. Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1		1	paket		0	paket	-		0,00%							
Rata-rata Kinerja																				
Predikat Kinerja																				
			Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	32.680.875	100	%	28.381.000			0									
			Jumlah dokumen yang terbunyi	10		10	dokumen	32.680.875	10	dokumen	10,00	11.081.232	60,00%	39,04%						
			Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	1	3.410.000	1	dokumen	750.000	1	dokumen	750.000	750.000	75,00%	100,00%						
KEC. KALLIAN GRRIK																				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Tingkat Rencana PD pada tahun 2024 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Kinerja Rencana PD s.d. Rencana SKPD tahun lalu (2021)		Tingkat Kinerja dan Anggaran Rencana PD tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Anggaran Rencana PD s.d. Tahun 2022 (Akkumulatif tahun pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s.d. Tahun 2022 (%)		Unit PO Perincian gung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	540 orang	6.790.500 Rp	100 orang	11.790.500 Rp	220.000 orang	10.570.500 Rp	100,00%	100,00%	89,55%										
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1. Jumlah/ frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan desa yang difasilitasi	12 kali	6.257.000 Rp	100 kali																
			2. Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	20 desa																		
			3. Jumlah Satlimas desa yang dibina	20 orang																		
			4. Jumlah anggota Pastibra yang terbiasa	40 orang																		
Rata-rata Kinerja										14.070.500	60,65%	22,49%										
Predikat Kinerja										615.245.331												
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																						
TOTAL DATA-BATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 SD PROGRAM)																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 SD PROGRAM)																						
Faktor pendukung keberhasilan kinerja : ..																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : ..																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : ..																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana SKPD berikutnya : ..																						

Disusun
Juli 2022



Dievaluasi

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.
NIP. 19800730 199810 1 001

**EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIANGKRIK
TAHUN 2022**

KODE	URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2022		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							
	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	61,63%	R	1.713.596.900	1.018.615.019	848.055.968	49,49	SR
	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah							
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	60,00%	R	28.381.000	13.336.945	11.081.232	39,04	SR
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	Persentase desa yang tertib administrasi	80,00%	T	33.500.000	10.440.330	9.427.720	28,14	SR

KODE	URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2022		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
L.04	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	60,00%	R	24.500.000	16.501.725	15.750.000	64,29	R
.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	60,63%	R	62.560.500	19.720.500	14.070.500	22,49	SR
	TOTAL RATA-RATA	64,45%	R	1.862.538.400	1.078.614.519	898.385.420	48,23	SR

